



Tragedi Kemanusiaan Rohingya

Simela Victor Muhamad^{*)}

Abstrak

Aksi kekerasan antara etnis Rakhine dan Rohingya memanas sejak awal Juni lalu. Kerusuhan lantas menjalar ke beberapa kota lain di Rakhine. Myanmar akhirnya menetapkan kondisi darurat militer pada Juni dan mengirim pasukan bersenjata berat ke Negara Bagian Rakhine. Namun, kedatangan pasukan ini menurut Human Rights Watch (selanjutnya disingkat HRW) justru menjadi petaka bagi Muslim Rohingya. Tragedi kemanusiaan yang menimpa warga Rohingya tidak saja menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran masyarakat internasional, tetapi juga telah menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak di Indonesia. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa tragedi kemanusiaan Rohingya sebagai pelanggaran HAM berat dan crime against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan) yang secara spesifik mengarah kepada genosida atau pemusnahan etnis, dan oleh karena itu harus diambil langkah-langkah konstruktif untuk mengatasinya, baik secara internal maupun regional.

A. Pendahuluan

Bara permusuhan kembali terjadi di Negara Bagian Rakhine antara etnis Rakhine dan Muslim Rohingya pada 5 Agustus 2012. Diberitakan, tiga orang tewas dan lima orang lainnya luka-luka. Bentrokan terjadi di Kota Kyauktaw, sekitar 100 km sebelah utara ibu kota Negara Bagian Rakhine, Sitwe. Tidak diketahui korban tewas berasal dari Muslim Rohingya atau etnis Rakhine yang beragama Buddha. Begitu pula penyebab bentrokan. Bentrokan terjadi sehari setelah utusan khusus PBB untuk masalah HAM di Myanmar Tomas Ojea Quintana menyelesaikan misinya selama sepekan di Myanmar. Dalam pernyataannya, Quintana menegaskan perlu dibentuk Komisi Kebenaran untuk

menyelesaikan masalah diskriminasi Muslim Rohingya.

Aksi kekerasan antara etnis Rakhine dan Rohingya memanas sejak awal Juni lalu. Bentrokan etnis Buddha Rakhine dengan Muslim Myanmar dipicu oleh penemuan satu mayat perempuan etnis Rakhine. Muslim Rohingya langsung jadi tertuduh merampok dan memerkosa korban meski belum ada laporan yang jelas dari aparat berwenang. Ini membuat etnis Rakhine menyerang rombongan 10 Muslim Rohingya dan membunuh mereka. Kerusuhan lantas menjalar ke beberapa kota lain di Rakhine. Rumah-rumah Muslim Rohingya dibakar, termasuk masjid. Myanmar akhirnya menetapkan kondisi darurat militer pada Juni dan mengirim pasukan bersenjata berat ke Negara Bagian

^{*)} Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: victorsimela@yahoo.co.id

Rakhine. Namun, kedatangan pasukan ini menurut HRW justru menjadi petaka bagi Muslim Rohingya. Tentara pemerintah malah menembaki Muslim Rohingya yang dicap sebagai imigran gelap Bangladesh.

Dalam laporannya HRW menegaskan bahwa aparat keamanan Myanmar terlibat dalam aksi pembunuhan, pemerkosaan, dan penangkapan massal warga Rohingya saat terjadi kerusuhan bernuansa sektarian di kawasan Rakhine, Myanmar barat, Juni lalu. HRW merilis laporan setebal 56 halaman mengenai kondisi di Rakhine yang disusun berdasarkan 57 wawancara dengan warga Rakhine dan Rohingya. Pemerintah Myanmar secara resmi menyebut 78 orang tewas dari kedua pihak yang bertikai dalam kerusuhan tersebut. Namun, HRW menduga angka tersebut jauh di bawah angka korban tewas sesungguhnya.

B. Tragedi Kemanusiaan

Brad Adams, Direktur HRW Asia, mempertanyakan klaim Pemerintah Myanmar yang menyatakan berkomitmen mengakhiri konflik bernuansa sektarian tersebut. Padahal, kenyataannya berbagai bentuk kekerasan dan pertikaian etnis masih terus terjadi sampai sekarang. Brad Adams juga menyayangkan reaksi dunia internasional yang terkesan lambat. Ia mendesak negara Barat dan Amerika Serikat untuk tidak dibutakan oleh "narasi romantis" tentang proses reformasi dan perubahan yang sedang terjadi di Myanmar.

Penderitaan warga Rohingya semakin bertambah, ketika Bangladesh, salah satu negara tetangga terdekat Myanmar, melarang tiga organisasi kemanusiaan internasional beroperasi membantu pengungsi Rohingya asal Myanmar. Langkah Bangladesh itu dipandang akan berdampak sangat buruk dari segi kemanusiaan, sebagaimana dikemukakan manajer operasional organisasi *Doctors Without Borders* (MSF) untuk Bangladesh, Chris Lockyear, 4 Agustus 2012. MSF adalah satu dari tiga organisasi kemanusiaan yang terkena dampak keputusan Pemerintah Bangladesh itu.

Selain MSF, Pemerintah Bangladesh juga melarang organisasi kemanusiaan *Action Against Hunger* (ACF) dan *Muslim Aid* meneruskan kegiatan mereka.

Alasannya, bantuan yang diberikan, baik makanan, tempat berlindung, maupun obat-obatan, justru mendorong semakin banyak pengungsi Rohingya dari Myanmar. Pemerintah Bangladesh juga menuduh MSF telah merusak citra negeri itu dengan memberikan pernyataan-pernyataan negatif soal kondisi buruk dan kesulitan yang dihadapi warga Rohingya. Tuduhan itu dilontarkan Biro Urusan Lembaga Swadaya Masyarakat di bawah koordinasi langsung kantor Perdana Menteri Bangladesh.

Lockyear mengingatkan Pemerintah Bangladesh bahwa kebijakannya itu bakal berkonsekuensi sangat buruk secara kemanusiaan. Pihak MSF telah beroperasi dan mendirikan pusat kesehatan di wilayah Cox's Bazaar, tempat penampungan pengungsi Rohingya, sejak tahun 1992. Pusat kesehatan itu menyediakan bantuan medis untuk 5.000 orang, baik Rohingya maupun warga lokal, setiap bulan. Separuh dari angka itu adalah anak-anak berusia di bawah lima tahun. Sekitar 30% anak pengungsi tak terdaftar yang ditampung di kamp pengungsi sementara Kutupalong di Cox's Bazaar berada dalam kondisi kurang gizi.

Saat ini, menurut Fery Kuntoro (Kepala Humas Aksi Cepat Tanggap/ACT), sekitar 30 ribu Muslim Rohingya di kamp pengungsian sangat membutuhkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan. Bantuan yang datang dari *Muslim Aid* saat ini sudah berhenti mengalir karena adanya larangan dari Bangladesh dan Myanmar. Semenjak dilarang, sudah tidak ada lagi bantuan yang masuk ke Kamp Lada. Kenyataan ini menunjukkan, nasib yang dialami warga Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan terus berlanjut.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyerukan agar komunitas Muslim di seluruh dunia memberikan bantuan kemanusiaan, finansial, dan politis kepada warga Rohingya yang menjadi korban kekerasan di Myanmar. OKI sendiri akan menyelenggarakan KTT Luar Biasa di Mekkah, Arab Saudi, pada pertengahan Agustus 2012, yang salah satu agendanya adalah menyikapi masalah Rohingya. OKI merencanakan mengirim utusan ke Myanmar dalam misi pencarian fakta penindasan Muslim Rohingya.

Sekjen OKI Ekmeleddin Ihsanoglu mengatakan, OKI akan secepatnya menghubungi Pemerintah Myanmar terkait rencana pengiriman tim tersebut. Ihsanoglu mengaku kecewa karena komunitas internasional gagal menekan Pemerintah Myanmar untuk menghentikan pembersihan etnis Muslim Rohingya. Kegagalan itu, menurut Ihsanoglu, akibat komunitas internasional tidak bersatu menghadapi Pemerintah Myanmar. Menyikapi hal itu, OKI meminta Komisi Independen HAM OKI untuk mempelajari kasus Rohingya dan dampaknya dalam sesi pertemuan lanjutan OKI di Turki, bulan depan (September 2012).

C. Keprihatinan dan Pandangan Berbagai Pihak

Tragedi kemanusiaan Rohingya tidak saja menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran masyarakat internasional, seperti OKI, HRW, dan organisasi kemanusiaan internasional, tetapi juga menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak di Indonesia. Rohaniwan Katolik, Romo Antonius Benny Susetyo, mengecam kekerasan terhadap Muslim Rohingya, yang dinilainya sebagai pelanggaran HAM berat. Ketua Komnas HAM Idris Kasim, menilai apa yang terjadi di Myanmar itu adalah kekerasan negara terhadap warganya. Menurut Ketua PBNU Masdar Farid, meskipun ada nuansa keagamaan dalam tragedi pengusiran etnis Rohingya, tetap harus dilihat bahwa ini merupakan persoalan kemanusiaan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Kerukunan Umat Beragama Slamet Effendy Yusuf menegaskan, konflik komunal dan pengungsian etnis Rohingya bukan konflik agama. Konflik di daerah itu merupakan persoalan etnis yang terakumulasi di bidang lain, seperti sosial dan kriminal. Presiden Kaukus Antar-Parlemen ASEAN untuk Myanmar (AIPCM), Eva Kusuma Sundari mengecam keras kekerasan sektarian, dan prihatin atas solusi yang diajukan Presiden Thein Sein untuk mengakhiri konflik dan kekerasan di Rakhine, Myanmar. AIPCM menilai, solusi Thein Sein tidak memperlihatkan keinginan untuk mempromosikan rekonsiliasi nasional, sebagaimana agenda

penegakan demokrasi yang ia sampaikan dalam kampanye kepresidenannya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Marzuki Alie dihadapan wartawan di Jakarta pada 24 Juli 2012 mengatakan, pembantaian muslim Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan yang memprihatinkan dan dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat dan *crime against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan) yang secara spesifik mengarah kepada genosida atau pemusnahan etnis. Menurut Marzuki, Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, harus proaktif memberikan teguran yang keras kepada Myanmar dan mendesak negara itu untuk menghormati HAM dan menyelesaikan konflik yang ada dengan memberikan hak hidup dan kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya seperti warga lainnya. Terkait ASEAN, Marzuki menambahkan, Myanmar harus diingatkan komitmennya terhadap demokrasi, jadi bukan hanya secara prosedural dengan memperbolehkan tokoh oposisi Aung San Suu Kyi ikut pemilu saja, tetapi jauh lebih penting adalah demokrasi substansial yang terkait erat dengan HAM, khususnya hak hidup etnis Rohingya.

Ketua DPR RI Marzuki Alie, yang juga Presiden *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) juga berpandangan bahwa masalah Rohingya harus dibawa ke dalam forum Sidang Umum AIPA yang akan berlangsung di Lombok, Indonesia, pada pertengahan September 2012 untuk dicarikan jalan keluarnya. Perlu bagi komunitas negara-negara di Asia Tenggara memberi solusi terbaik bagi nasib jutaan Muslim Rohingya, tanpa membuat Myanmar tersinggung.

Komisi Hak Asasi Manusia (HAM/ ICHR) ASEAN mendesak Myanmar untuk segera mengakui kewarganegaraan etnis Muslim Rohingya. Anggota Komisi HAM ASEAN asal Indonesia, Rafendi Djamin mengatakan, Pemerintah Myanmar sangat diskriminatif terhadap sejumlah etnis, termasuk Rohingya, ini terlihat dari undang-undang kewarganegaraan yang berlaku di negara tersebut, dan ini jelas bertentangan dengan HAM internasional. Untuk itu, menurut Rafendi Djamin, ASEAN harus menekan Myanmar agar merevisi undang-undang kewarganegaraan dan dapat memberikan status kewarganegaraan

yang penuh bagi Muslim Rohingya. ICHR tengah menyusun konvensi ASEAN tentang kewarganegaraan yang dapat menjadi acuan bagi ASEAN, sehingga tidak ada orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.

D. Sikap Pemerintah Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, Pemerintah Indonesia segera mengirimkan surat resmi kepada Presiden Myanmar Thein Sein terkait penyelesaian nasib Muslim Rohingya, sebagai ungkapan akan harapan Indonesia kepada Pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan permasalahan etnis Rohingya. Presiden membantah anggapan bahwa Pemerintah Indonesia diam dan tidak melakukan apa-apa untuk Muslim Rohingya. Indonesia terus melakukan upaya diplomasi, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral, termasuk membahasnya dalam forum internasional seperti di PBB ataupun ASEAN.

Sekretaris Jenderal *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS) KH Hasyim Muzadi menyambut baik upaya Presiden menyurati Presiden Myanmar Thein Sein tersebut. Menurut Hasyim, Indonesia sudah seharusnya proaktif dalam menyelamatkan Muslim Rohingya yang menjadi korban kekerasan di Myanmar, dan segera melakukan langkah-langkah diplomatik untuk menghentikan kekerasan dan meminta Myanmar membuka akses bagi bantuan kemanusiaan.

E. Penutup

Tindak kekerasan terhadap warga Rohingya yang melibatkan aparat keamanan Myanmar, menjadi noda hitam Myanmar yang membangun citra. Dari perspektif kemanusiaan, hal tersebut jelas jauh dari prinsip hormat terhadap martabat manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia mempunyai nilai dalam dirinya sendiri dan tidak pernah boleh diperalat untuk tujuan apa pun, termasuk tujuan pemuasan diri, politik, dan militer. Mengapa harus ditempuh cara kekerasan untuk menyelesaikan konflik bernuansa sektarian. Cara-cara demikian hanya akan

melahirkan kebencian dan juga dendam baru yang akan terus beranak pinak serta semakin menjauhkan dari perdamaian dan terciptanya hidup rukun dan damai saling menghormati.

Secara internal, Pemerintah Myanmar diharapkan segera menyelesaikan masalah Rohingya dengan cara-cara yang lebih manusiawi, menjunjung martabat manusia, tanpa melihat suku, etnis, agama, dan golongan. Kemunculan Aung San Suu Kyi sebagai tokoh pejuang HAM dan pembela demokrasi di Myanmar, yang sudah kembali aktif berpolitik dengan mengikuti pemilu sela pada April 2012 lalu, diharapkan juga bisa membawa harapan baru bagi Myanmar.

Secara regional, ASEAN, termasuk Indonesia, harus mengambil langkah-langkah konstruktif untuk membantu mencari solusi terbaik bagi persoalan yang dihadapi Myanmar. Karena bagaimana pun, persoalan Rohingya sudah menjadi isu internasional dan "menggangu" kawasan dengan mengalirnya pengungsi Rohingya ke beberapa negara Asia Tenggara. Begitu juga dengan AIPA, sebagai forum lembaga antarparlemen di Kawasan Asia Tenggara, perlu merespon dan turut memberi kontribusi untuk mencari solusi atas persoalan ini.

Rujukan:

1. "Tragedi Kemanusiaan Rohingya, Bagaimana Sikap Indonesia?," *Republika Online*, 22 Juli 2012, <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/07/22/m7jowt-tragedi-kemanusiaan-rohingya-bagaimana-sikap-indonesia>, diakses 2 Agustus 2012.
2. "RI ready to fight for Rohingya," *The Jakarta Post*, 31 Juli 2012.
3. "Aparat Terlibat Kerusuhan," *Kompas*, 2 Agustus 2012.
4. "SBY Surati Thein Sein," *Republika*, 5 Agustus 2012.
5. "Indonesia Siap Bantu," *Kompas*, 5 Agustus 2012.
6. "Larangan agar Dicabut, Myanmar Diminta Segera Bentuk Komisi Kebenaran," *Kompas*, 6 Agustus 2012.
7. "Rakhine Bergolak Lagi, Tiga Tewas," *Republika*, 7 Agustus 2012.